

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
SEWA HARTA WAKAF DENGAN SISTEM LELANG**
"Studi Lapangan di Badan Kesejahteraan Masjid,
Kab Karawang Jawa Barat"



S K R I P S I

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 A22 AS	No REG : S-2010/AS/122 ASAL BUKU : TANGGAL : Oleh :

Wahyu Mardiansyah
NIM. C01205031

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2010**

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Mardiansyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 03 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Wang

Sri Warjiyati, SH.,MH.
NIP. 196808262005012001

Sekretaris,



Nabiela Naily, S.Si.,MHi,MA.
NIP. 198102262005012003

Penguji I,

Chinell:

Dra.Hj.Siti Dalilah Candrawati, MAG
NIP. 196006201989032001

Penguji II,



Titik Triwulan Tutik, SH.,MH.
NIP. 196803292000032001

Pembimbing,

[Handwritten signature]

Sri Warjiyati SH.,MH.
NIP. 196808262005012001

Surabaya, 03 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN PROPOSAL

Proposal saudara **Wahyu Mardiansyah NIM. C01205031** ini telah diseminarkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Juli 2010** dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk ujian munaqosah

Surabaya, 29 Juli 2010
Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah

H. Arif Jamaluddin Malik M.Ag
Nip. 197211061996031001

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang di Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Karawang Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai; *pertama*, bagaimana pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang di BKM Karawang Jawa Barat. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang di BKM Karawang Jawa Barat.

Data penelitian ini dihimpun melalui studi dokumen, interview dengan pihak BKM Karawang Jawa Barat, yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang di BKM Karawang Jawa Barat adalah:

Pengelolaan harta wakaf Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Karawang Jawa Barat dengan cara sewa sawah wakaf dengan menggunakan sistem lelang, sewa gedung dan bangunannya untuk bisnis. Dari hasil pengelolaan harta wakaf tadi digunakan untuk melaksanakan program BKM tiap tahunnya yaitu memberi bantuan untuk tempat-tempat ibadah, pendidikan Islam, kegiatan sosial keagamaan, serta untuk pemeliharaan masjid dan operasional kegiatan Masjid Agung Karawang Jawa Barat, kemudian untuk haul Syech Quro tiap tahunnya. Kemudian dari hasil pengelolaan harta wakaf tadi diperuntukkan untuk pengembangan harta wakaf dengan cara pembelian sawah baru.

Dalam tinjauan Hukum Islam dengan adanya hak *qarar* atas tanah wakaf, yaitu *haqqul Hakr* dan *Haqqul Ijaratain*, pengelolaan dengan menggunakan sistem sewa sawah wakaf ataupun menyewa gedung dan bangunan, kemudian hasil dari sewanya diperuntukkan untuk tujuan wakaf diperbolehkan, sehingga tanah tersebut tidak terbengkelai dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya.

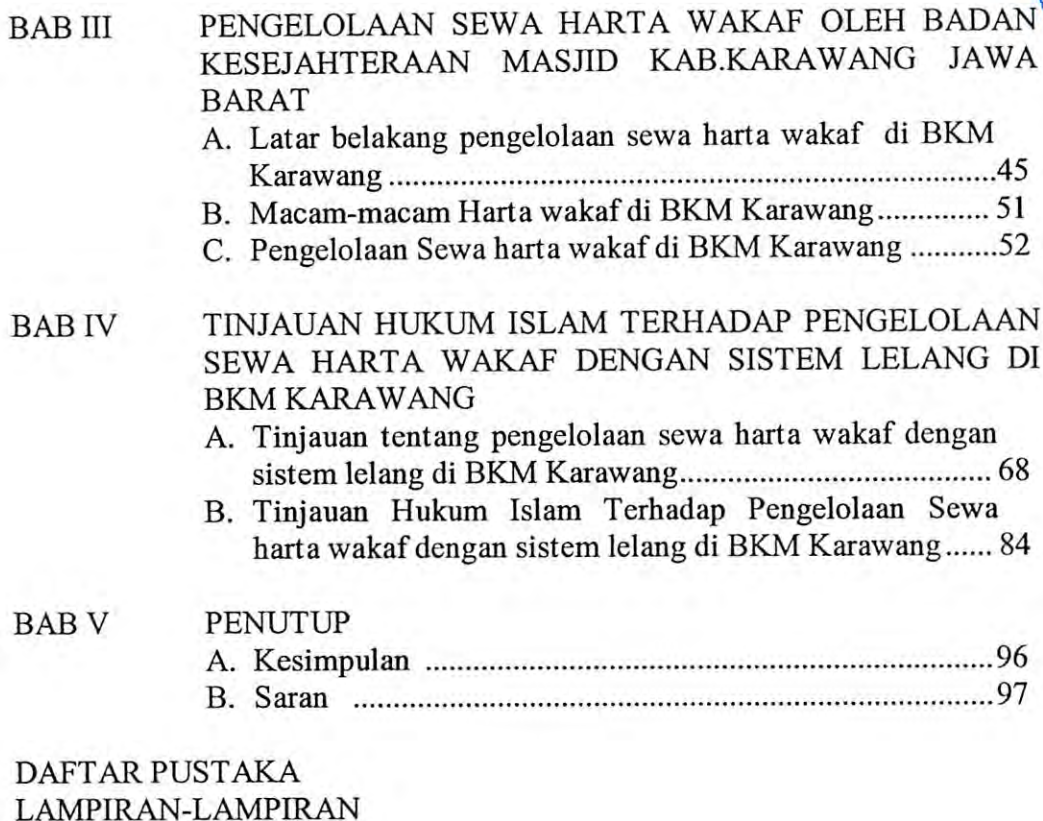
Sedangkan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang dengan salah satu tujuannya adalah memelihara, masjid baik secara fisik dan non-fisik, serta membina dalam kepengurusan dan pemberdayaan masjid.

Demi terwujudnya kemaslahatan umum, penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah dengan adanya undang-undang wakaf, semestinya lebih meningkatkan pengawasannya terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
2. Badan Wakaf Indonesia harus memberi stimulus atau rangsangan terhadap pengelolaan harta wakaf, sehingga optimalisasi pengelolaan harta wakaf bisa tercapai.
3. Hasil pengelolaan harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat harus dialokasikan dan disesuaikan kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Kegunaan Hasil Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	
PENGELOLAAN SEWA HARTA WAKAF DENGAN SISTEM LELANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	
A. Tinjauan Umum tentang Sewa (<i>ijarah</i>)	18
1. Pengertian sewa	18
2. Dasar Hukum Sewa	19
3. Rukun dan syarat sewa	21
4. Pembatalan dan berakhirnya sewa	22
B. Wakaf	23
1. Pengertian wakaf	23
2. Dasar Hukum Wakaf	25
3. Rukun dan Syarat wakaf	30
4. Macam-macam wakaf	38
5. Hal-hal yang terkait dengan wakaf	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perwakafan atau shadaqah jariyah dalam Islam mendapat tempat yang istimewa. Shodaqoh jariyah, dalam arti shadaqah yang pahalanya senantiasa mengalir diinterpretasikan dalam bentuk amal wakaf. Wakaf dalam arti bahasa yang diambil dari kata *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan*, yang berarti berhenti atau berdiri.¹ Dengan kata *Muradif* atau konotasinya *al habsu* yang berarti mengukuhkan orang dari sesuatu, kemudian kata *habbasa* secara bahasa diartikan dengan mewariskan harta karena Allah.²

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Haj (22) ayat 77 Tuhan memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan supaya manusia itu bahagia. Disurah lain Allah memerintahkan manusia membelanjakan (menyedekahkan) hartanya yang baik. Dalam surah al-Imran (3) ayat 92 Tuhan menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali jika ia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenanginya (pada orang lain). Ayat-

¹ M Fadhullah dan B. T.H Brondgeest, *Kamus Arab Melayu*, Jakarta :Balai Pustaka Jilid IV, 1927, 1011

² *Ibid*, Jilid I 117

menjadi jaringan layanan kesejahteraan dan derma (seperti sekolah, panti asuhan yatim piatu dan dapur umum) bagi penduduk muslim dan dapat membiayai pemeliharaan masjid-masjid dan kuburan-kuburan terkenal, pasokan air, serta jembatan-jembatan, birokrasi-birokrasi besar dan berpengaruh bermunculan untuk mengelola wakaf.⁶

Begitu pesatnya upaya pengembangan dalam pengelolaan harta wakaf di beberapa negara di dunia. Kemudian bagaimana perkembangan dalam pemanfaatan harta wakaf di Indonesia?

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum optimal dan menghadapi banyak kendala. Tampaknya yang masih sebatas yang dikelola oleh yayasan atau badan Hukum. Sebenarnya pengelolaan ini dapat dioptimalkan, baik dari perhimpunan orang-orang yang mewakafkan bendanya. Bisa saja dengan “Gerakan Sadar Wakaf” dan pengorganisasiannya ditangani secara serius.

Sekarang ini di Departemen Agama baru ada direktorat yang menangani pengembangan Zakat dan Wakaf, dan itupun belum ada satu tahun. Hasilnya pun belum juga dapat diketahui, ada pengaruh yang signifikan atau tidak. Dalam workshop Internasional di Batam beberapa waktu yang lalu, direkomendasikan agar pengurusan wakaf ini diwadahi dalam suatu Direktorat Jendral atau bahkan melekat menjadi tugas Kementrian seperti halnya di Arab Saudi dengan

⁶ Michel Dumper, *Wakaf kaum Muslim di Negara Yahudi*, Cet. I, Jakarta: Lentera, 1999, XII.

syarat-syarat yang ditentukan oleh *wakif*.⁹ *Nazir* harus bertanggung jawab terhadap harta wakaf. Penyimpangan dari itu, berarti sudah mengkhianati amanat Allah SWT. oleh karena itu begitu pentingnya kedudukan *nazir* dalam perwakafan, maka pada diri *nazir* perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Begitupun dalam usahanya dalam pengembangan harta wakaf harus sesuai dengan hukum Islam .

Yang menerima wakaf (*mauquf 'alayh*) biasanya sudah berupa badan hukum, seperti Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) atau yayasan, Yang di singkat menjadi BKM yang selanjutnya dalam skripsi ini singkatan tersebut. Nah kini tinggal siapa yang berhak untuk memanfaatkannya dan tentu bagaimana manajemennya. Oleh karena itu, disini perlu adanya ketegasan bahwa harta wakaf itu adalah "dana umat" yang pemanfaatanya haruslah untuk kemaslahatan umat pula, bukan semata-mata kemaslahatan orang perorang, pengurus BKM, atau pengurus yayasan.¹⁰

Kegairahan dan semangat umat Islam di Indonesia dalam berwakaf, kini terlihat tiada terhitung banyaknya, dan luas tanah-tanah milik yang berstatus tanah wakaf dimanfaatkan untuk masjid, musholla, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, panti asuhan yatim piatu, bahkan dalam kegiatan ekonomi yang

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: al-Ma'arif, tth,

¹⁰ A. Qodri Azizy, PD., *Op.Cit.*, 123.

mana hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan umum. Walaupun di Indonesia, wakaf pada umumnya, berupa benda-benda konsumtif, bukan barang-barang

produktif. Sehingga terjadi masalah mengenai biaya pemeliharaannya. dan perlu adanya jawaban atas permasalahan tadi, agar harta wakaf tadi dapat bermanfaat secara maksimal.

Secara teori harta wakaf sebenar nya tidak boleh di perjual belikan atau di sewakan,harta wakaf seharusnya di manfaatkan atau di kelola sebagai mana adanya.Sedangkan penomena BKM menunjukan harta wakaf disana berupa tanah sawah dan bangunan ternyata di sewakan oleh pihak nazir. Di sini penulis meneliti tindakan tersebut di tinjau dari hukum Islam.

Memang akhir-akhir ini, sebagaimana ketentuan hukum Islam lainnya, ketentuan wakafpun mengalami perkembangan dan pengaktualisasian, sejalan dengan dinamika hukum Islam itu sendiri. Hal ini terlihat dengan perkembangan pengelolaan harta wakaf di negara Islam, seperti kementrian Urusan Wakaf di Mesir yang telah berhasil dalam memanfaatkan harta wakafnya dalam berbagai bentuk.

Pemanfaatan harta wakaf dapat meliputi setidaknya program-program yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis: (a) bangunan fisik; (b) peningkatan keilmuan, termasuk perpustakaan; (c) pendidikan TK sampai ke

Prinsip pokok dalam hal pengembangan harta dalam pandangan Islam ialah kegiatan ekonomi harus tetap sejalan atau tidak bertentangan dengan aqidah Sebagai bahan renungan dapat dilihat ketentuan yang terdapat dalam surat Hud ayat 84, 86 dan 87.¹³

Berdasarkan Uraian yang telah disebutkan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menyusunnya dalam bentuk skripsi mengenai "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN SEWA HARTA WAKAF DENGAN SISTEM LELANG"

¹³ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, 14.

(Studi lapangan di Badan Kesejahteraan Masjid. Kabupaten Karawang Jawa Barat).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan penulis ingin teliti lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang di BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang di BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat ?

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Batasan skripsi ini menerangkan hanya dalam lingkup kajian lapangan dan literatur yang dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya bagi fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, serta dapat menjadi pembanding untuk karya ilmiah berikutnya.

"Membangun Fondasi Ekonomi Umat (meneropong prospek berkembangnya ekonomi Islam)", dalam buku tersebut membahas mengenai harta wakaf sebagai dana umat, yang mana harus dikelola dan dikembangkan, agar dapat bermanfaat demi kemaslahatan umat dengan sistem manajemen, bisnis dan ekonomi yang sesuai dengan syari'at.¹⁴

Yulia Qamariyanti, S.H, M. Hum., dalam bukunya yang berjudul “Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf”, dalam buku tersebut membahas mengenai persamaan dan perbedaan tentang trust dan wakaf, dan membahas tentang pengelolaan wakaf milik Muhamadiyah yang ada di Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Agus Ali Humaedi, dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisa Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hambali Tentang Menjual Belikan Harta Wakaf”, dalam skripsi tersebut membandingkan pendapat Imam Safi’i yang kaku atas ketidak bolehan menjual/mengganti harta wakaf dan Imam Hambali yang fleksibel dengan berdasarkan asas manfaat (*al-maslahah almursalah*), ketika melihat masalah ini.

Ali Muhamad, dalam skripsinya yang berjudul “pengelolaan harta wakaf tanah di yayasan pondok pesantren Ar-Roudlotul ilmiah” di Desa Bawean Kab.Nganjuk, dalam skripsi tersebut menjelaskan pelaksanaan atau prosesnya pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh pengurus dan santri yayasan

¹⁴ A. Qodri Azizy, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

pondok pesantren Ar-Roudlotul ilmiyah, agar tanah wakaf yang ada di yayasan pondok pesantren bisa bermanfaat bagi santri dan yayasan untuk kepentingan ibadah,tetapi mereka melaksanakan dengan aturan hukum Islam.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN SEWA HARTA WAKAF DENGAN SISTEM LELANG (Studi Lapangan di Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Karawang Jawa Barat)”. Untuk itu penulis meneliti dan menelaah lebih jauh tentang pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang oleh BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat yang ditinjau dari hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN SEWA HARTA WAKAF DENGAN SISTEM LELANG (Studi Lapangan di Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Karawang Jawa Barat)”, agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk menghindari salah pengertian terhadap judul, maka akan dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan yang terdapat dalam ajaran Islam yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang

Barat)”, agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk menghindari salah pengertian terhadap judul, maka akan dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Hukum Islam : adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukhallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁵

KHI dan Undang-undang wakaf No.41 Tahun 2004

Sewa : Sewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana perjanjian sewa menyewa antara dua pihak BKM selaku Nazir dengan pihak yang menyewa . Hukum dari sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan.

Wakaf : Harta yang di wakaf kan tanah seluas 550 h dilokasai yang berbagai kecamatan yang ada di kab.Karawang Jawa Barat, itulah yang di maksud wakaf dalam uraian ini.¹⁶

Lelang : Sistem penawaran barang dihadapan orang banyak (dengan Tawaran yang atas mengatasi) yang dipimpin oleh pejabat lelang.

¹⁵ *Ibid*, 37

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam: zakat dan wakaf*, cet.1, Jakarta: UI Press, 1988, 80

wakaf tadi, juga pihakpihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang penulis kaji.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, Legger agenda dan sebagainya.¹⁹

c. Observasi

Yaitu biasa diartikan, sebagai pengamat data dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁰ Teknik ini dilakukan untuk mengamati bagaimana jalannya pelaksanaan lelang sewa tanah wakaf Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Karawang Jawa Barat .

2. Metode Analisis Data

a. Metode Deskriptif Analisis

Metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.²¹

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. X, 1996, 234.

²⁰ Hadari Nawawi, *Op.Cit.*, 100

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. X, 1998, 209.

Metode ini digunakan untuk memberikan solusi penyelesaian terhadap permasalahan yang ada agar sesuai dengan syari'at Islam dan hukum yang berlaku.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab Pertama : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan/ penelitian, telaah pustaka, definisi operasional, metode penulisan/penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Ketentuan umum tentang perwakafan, bab ini berisi tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, dan Hal-hal yang terkait dengan ketentuan hukum harta wakaf.

Bab Ketiga : Pengelolaan harta wakaf di Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Karawang Jawa Barat , bab ini berisi tentang sejarah timbulnya harta wakaf Badan Kesejahteraan Masjid Kab. Karawang, macam-macam harta wakaf Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Karawang Jawa Barat , pengelolaan harta wakaf di Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Karawang Jawa Barat .

Bab Keempat : Analisa, bab ini merupakan pokok inti yang di dalamnya menyangkut tentang, dan deskripsi pengelolaan sewa harta

Bab Kelima : Penutup, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, diikuti dengan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II
KETENTUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN SEWA HARTA
WAKAF DENGAN SISTEM LELANG

A. Tinjauan umum tentang sewa

1. Pengertian sewa

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah al-
'iwadh yang arti bahasa Indonesiannya ialah ganti dan upah.²²

Ijarah menurut syara' adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang. Dalam bahasa arab *ijarah* adalah sewa-menyewa.

Ijarah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, setiap yang dapat di ambil manfaatnya serta setiap keadaannya adalah sah untuk di persewakan.

Dalam kehidupan sehari-hari yang demikian ini merupakan pengetahuan bagi manusia dalam melakukan hal tersebut yang secara mutlak persewaan itu adalah bayar dimuka, kecuali disyaratkan bayar belakang. Dan dalam peristilahan sehari-hari pihak yang menggadaikan disebut dengan "pemberi gadai" dan yang menerima gadai dinamakan "penerima atau pemegang gadai" maka dari itu pengertian gadai yang ada

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bairut Dar Al-Fikr, 1977, 1

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Hukum dari sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan.²³

Dalam sewa menyewa harus ada barang yang disewakan, penyewa, pemberi sewa, imbalan dan kesepakatan antara pemilik barang dan yang menyewa barang. Penyewa dalam mengembalikan barang atau aset yang disewa harus mengembalikan barang secara utuh seperti pertama kali dipinjam tanpa berkurang maupun bertambah, kecuali ada kesepakatan lain yang disepakati saat sebelum barang berpindah tangan.

Dasar hukum sewa (*ijarah*) adalah al-Qur'an, Al-Sunnah dan Al-ijma, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

....فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ.... (٦)

[illegible]

- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah.

Disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Hendaknya barang yang menjadi obyek akad sewa dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang.
 - 3) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
4. Pembatalan dan berakhirnya sewa

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

***Ijarah* akan menjadi batal (fasakh) apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:**

- Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- Rusaknya barang yang disewakan
- Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*)
- Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

- ## B. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf menurut bahasa arab berarti “*al habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasu*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah.³²

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa (*fiil madhi*) –*yaqifu* (*fiil mudhori*)-*waqfan* (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri.³³

Kata *Waqafa* juga dapat berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Pengertian menahan (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang di maksud wakaf dalam uraian ini.³⁴

Sedangkan wakaf menurut istilah Syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (lainnya) dan digunakan untuk kebaikan.³⁵

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam: zakat dan wakaf*, cet.1, Jakarta: UI Press, 1988, 80

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, 242

- e. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- f. Harta yang lepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau diperjual belikan.³⁹

2. Dasar Hukum Wakaf

Kendatipun tidak jelas dan tegas wakaf disebutkan dalam Al- Quran, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan.

Misalnya Firman Allah:

a. QS. Al-Baqarah, 2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."* (QS Al-Baqarah: 267)⁴⁰

b. QS. Ali Imran, 3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

³⁹Ahmad Rofiq, op. cit., 491

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1978/1979, 91

- a. UU no. 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberi isyarat bahwa “perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.
- b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
- c. Peraturan pemerintah No. 38 tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963 tentang Penunjukan Badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Dikeluarkan ini karena sebagai realisasidari apa yang dimaksud oleh pasal 21 aayt (2) UUPA.
- d. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai perwakafan tanah milik.
- f. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemarintah No.28 tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik.

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang Penambahan Ketentuan Menngeni Biaya pendaftaran Tanah untuk Badan-badan Hukum tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1978.
- h. Intruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- i. Intruksi Menti agama No. 3 tahun 1979 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No.73 tahun 1978 tentant pendelegasian Wewenang kepada Kanwil Depag Propinsi/setingkat untuk mengangkat dan memeberhentikan setiap kepala Kator Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akata Ikrar Wakaf (PPAIW)
- j. Intruksi Menteri Agama No.3 tahun 1987 tentang Bimbingan dan pembinaan kepada Badan Hukum Keagamaansebagai *Nazir* dan Badan hukum Keagamaan yang memiliki tanah.
- k. Intruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1989 tentang pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Persetifikatan TanahWakaf.
- l. Intrusi menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 tahun 1990 tentang setifikat tanah wakaf.
- m. Keputusan Dirjen Bimas dan urusan haji No. 15 tahun 1990 tentang penyempurnaan formulir dan pedoman pelaksanaan formulir dan

- n. Surat edaran Dirjen Bimas dan urusan haji No. D.11/5/HK/007/901/1989 tentang Penunjuk Perubahan Satatus/Tukar menukaar Tanah Wakaf.
- o. Surat kepala Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tentang pelaksanaan Persetifikatan tanah wakaf.⁴⁶

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang Wakaf terdiri atas 11 Bab dan 71 Pasal.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Adapun syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu maka bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka 10 tahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal.
- b. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, pekuburan (makam) dan yang lainnya, namun apabila seseorang mewakafkan suatu benda kepada hukum tanpa

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Himpunan peraturan Perundang-undangan Perwakafan tanah milik*, Jakarta: Bag. Proyek Peningkatan Zakat dan wakaf, 2002, ix-xi

dipaksa. Dan telah mencapai umur balig.⁴⁸ benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu dan harta itu harus bebas dari beban hutang pada orang lain. Kalaupun ada, beban itu harus diangkat dahulu supaya dengan tindakan itu wakif tidak merugikan orang lain.⁴⁹ Adapun syarat-syarat menurut pasal 217 KHI yaitu:

- 1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (Ps. 3 PP. No.28/1997)

Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang non muslim pun dapat melakukan wakaf sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, dan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰ Selain itu pula sifat wakaf yang *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa

⁴⁸ Abi Yahya Zakariya al-Ansari, *Fath al Wahhab*, juz 1, Beirut: Dar al- Fikr, 256

⁴⁹ Muhammad Daud Ali, *Op. Cit*, 85

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, 494

b. *Maukuf*(موقوف) atau benda yang diwakafkan

Golongan Malikiyah dan Syi'iah, membolehkan wakaf bendabenda yang bergerak, sebab menurut mereka : wakaf itu boleh bersifat sementara dan boleh pula bersifat selama-lamanya. Bahkan ulama malikiyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat dimiliki baik berupa benda atau manfaat dari suatu benda, binatang, makanan atau emas dapat dijadikan wakaf, jika wakaf itu bersifat sementara maka harta wakaf itu tidak disyaratkan tidak berubah-ubah. Jika wakaf itu selamanya dan benda yang bergerak itu dapat ditukar dengan benda yang

⁵² Hendi Suhendi, *op.cit.*, 243

c. *Maukuf 'alaih* (موقوف عليه) atau tujuan wakaf

d. Sighot (*سحوت*) atau ikrar/ pernyataan wakaf

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (ps. 1 (3) PP No. 28/1977 jo. ps. 215 (3) KHI).

⁵⁵ Muhammad Daud Ali, *op.cit.*, 87

e. *Nazir* Wakaf (*ناظر وقف*) atau pengelola wakaf

Nazir menurut pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia

1) Perseorangan

2) Organisasi; atau

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, op.cit., 498

Adapun syarat-syarat *nazir* menurut pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *Nazir* apabila memenuhi persyaratan :
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) Beragama Islam;
 - c) Dewasa;
 - d) Amanah;
 - e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Organisasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *Nazir* apabila memenuhi persyaratan :
 - a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan /atau keagamaan Islam.
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *Nazir* apabila memenuhi persyaratan :
 - a) Pengurus badan yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1); dan

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan menegembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁵⁸

a. **Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya**

1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khayri*): yaitu wakaf yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yatim, orang terlantar, orang buta dan orang Malang, begitu pula wakaf dapat diciptakan untuk pemeliharaan masjid, sekolah-sekolah, rumah-rumah

[illegible]

sakit, tanah kuburan, dan tempat-tempat lain dalam skup kemaslahatan masyarakat.⁵⁹

- 2) Wakaf keluarga (ahli): yaitu wakaf yang khusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga wakif maupun orang lain.⁶⁰
 - 3) Wakaf gabungan (*Musyarak*): yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.⁶¹
- b. Macam-macam wakaf berdasarkan batasan waktunya

Wakaf dalam batasan waktu terbagi dalam dua macam, yaitu :

- 1) Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan pengganti kerusakannya.
- 2) Wakaf sementara: yaitu apabila barang yang diserahkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan

⁵⁹ Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (syariah)*, Cet.1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, 432

⁶⁰ Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, 89

⁶¹ Mundzir Qonat, *Manajemen wakaf produktif*, cet.1, Jakarta: khalifa, 2005, 161

Pasal 41 menambahkan (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta wakaf semula. (4) ketentuan mengenai perubahan status hartabenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁶⁴

Dalam penggantian harta wakaf, ulama mazhab Hanafi membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal, 1) apabila wakif memberi isyarat akan pembolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya, 2) apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi

⁶⁴ Hadi Setia Tunggal, *op.cit.*, 15

dipertahankan, dan 3) jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.⁶⁵

Ulama Mazhab Maliki memebedakan jenis harta wakaf dalam kaitannya dengan penjualan harta tersebut, yaitu: 1) apabila harta wakaf berwujud, masjid, maka tidak boleh dijual, 2) apabila harta itu berbentuk harta tidak bergerak, maka tidak boleh dijual sekalipun hancur dan tidak boleh diganti dengan jenis yang sama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibeliakan lagi sesuai kebutuhan untuk memperluas masjid atau jalan umum, dan c) dalam bentuk benda lain dan hewan, apabila manfaatnya tidak ada lagi boleh dijual dan hasil penjualannya dibeliakan barang atau hewan sejenis.⁶⁶

Ulama Syafi'I pada umumnya memebatasi secara ketat penukaran atau penjualan harta wakaf. Hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa saja harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual, seperti suatu masjid telah rusak perlu diganti, atau karena ada suatu kepentingan umum yang perlu diindahkan sehingga sehingga suatu tanah wakaf harus ditukar, seperti karena akan dibangun jalan ditempat tanah wakaf itu, maka pemerintah menukarnya dengan tanah yang lain.⁶⁷

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, op.cit., 519

⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve, 1998, 1909

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, op.cit., 234

b. Pengelolaan dan Pengembangan Harta wakaf

Dalam Pasal 43 menyebutkan bahwa, (1) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syari'ah. (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka diperlukan lembaga penjamin syari'ah.

⁶⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2002, 666

peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.⁶⁹

c. Badan Wakaf Indonesia

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Wakaf menyebutkan bahwa, (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam Pasal 49 (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: (a) melakukan pembinaan terhadap *Nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (b) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; (3) memberikan persetujuan dan /atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; (d) memberhentikan dan mengganti *nazir*; (e) memberikan persetujuan atas penukaran benda wakaf; (f) memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan dibidang perwakafan.⁷⁰

d. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam Undang-Undang Wakaf pasal 63 menyebutkan bahwa, (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf; (2)

⁶⁹ Hadi Setia Tunggal, *op.cit.*, 16

⁷⁰ Ibid., 18-19

BAB III
PENGELOLAAN SEWA HARTA WAKAF OLEH BADAN
KESEJAHTERAAN MASJID KAB. KARAWANG JAWA BARAT

**A. Latar Belakang Pengelolaan sewa Harta Wakaf Oleh BKM Kabupaten Karawang
Jawa Barat**

1. Pengetian BKM

Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia nomer 505 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid, BKM adalah badan kesejahteraan masjid dibawah pembinaan Dep. Agama. BKM beraqidah Islam dan berazaskan Pancasila.

BKM mempunyai susunan organisasi secara vertikal di Propinsi, di Kabupaten/Kota, di Kecamatan dan di Kelurahan/Desa se Indonesia dan berkedudukan di ibukota masing-masing. Dalam KMA pasal 5 disebutkan bahwa tujuan BKM adalah:

- a. Menjaga martabat, kesucian, kehormatan dan kesejahteraan masjid serta tempat ibadah umat Islam atas dasar taqwa;
- b. Meningkatkan *idarah*, *imarah* dan *riayah* masjid dan tempat ibadah umat Islam lainnya, sesuai dengan fungsinya sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan agama Islam non formal dan pemberdayaan ekonomi umat serta media kesehatan umat.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 6 disebutkan beberapa usaha BKM yaitu:

- a. Membantu pembentukan dan penyempurnaan pengurus masjid
- b. Memberikan bantuan yang diperlukan baik fisik, maupun non-fisik untuk pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan masjid;
- c. Membantu pembinaan perpustakaan dan balai kesehatan masjid;
- d. Membantu pembinaan organisasi dan administrasi pemberdayaan masjid;
- e. Memberikan bimbingan peningkatan mutu khutbah Jum'at, Idul Fitri dan Idul Adha dengan mengadakan orientasi, penerbitan buku-buku pedoman dan bimbingan pemberdayaan masjid;
- f. Membantu penyelenggaraan pendidikan keagamaan bagi jama'ah masjid dan remaja masjid, TPA/TPQ dan Majelis Ta'lim yang berada di masjid;
- g. Mengusahakan agar terselenggarakannya radio siaran sebagai media dakwah;
- h. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan BKM.

Dalam KMA pasal 20 disebutkan bahwa Kekayaan BKM berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu kekayaan BKM dapat diperoleh dari:

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. Wakaf;
- c. Hibah;

- a. Pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan satuan kerja lainnya yang terkait serta unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan tokoh masyarakat sebagai anggota;
- b. Kepala seksi pemberdayaan masjid/Kepala Seksi Pendidikan Al-Qur'an dan pemberdayaan Masjid/Kepala Seksi Penamas pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota karena jabatannya diangkat menjadi Ketua BKM Kabupaten/Kota dan salah satu pegawai seksi Pemberdayaan Masjid/Seksi Pendidikan Al Qur'an dan Pemberdayaan Masjid/Seksi Penamas menjadi sekretaris BKM Kabupaten/kota;
- c. Pengurus BKM Kabupaten/Kota minimal 9 (sembilan) orang terdiri Ketua, Sekretaris,, Bendahara dan Bidang Idarah, Imarah dan Riayah serta anggota sesuai dengan kebutuhan.

No	Nama	Jabatan Dalam BKM	Jabatan Dalam Dinas
1	Drs. H. A. Taisir Muchasan	Pengawas	Kepala Kandepag Kab. Karawang Jawa Barat
2	Drs. H. Bambang Sugito TH	Ketua	Kasi Penamas
3	Ali Sugiyanto, SHI	Sekretaris	Staf Dayamas Seksi Penamas
4	H. Matroekan, SpdI	Bendahara	Staf Pendikaqur Seksi Penamas
5	Drs KH. Masruchin Ahmad	Anggota	Ketua Umum MUI Kab. Karawang Jawa Barat
6	H. Abdul Fatah, SH	Anggota	Ketua Ta'mir Masjid Agung Karawang Jawa Barat
7	Drs. H. Dachirin Said, SH	Anggota	Tokoh Masyarakat
8	H. Abdul Wachid, Sag	Anggota	Kasi Urusan Agama Islam
9	Drs. H. Abdullah Zaini	Anggota	Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Harta wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat pada awalnya berasal dari peninggalan Syech Quro yang merupakan pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa Barat.⁷²

Karawang Jawa Barat sebagai ibukota kerajaan Islam menjadikan tonggak perjuangan untuk menyebarkan agama Islam pada dasawarsa-dasawarsa pertama abad ke-16.⁷³

Setelah kerajaan Karawang Jawa Barat berakhir, semua yang bersangkutan dengan kerajaan Karawang Jawa Barat di bawa ke Wadas, dan tak meninggalkan sedikitpun sisa-sisa kerajaan, kecuali hanya tanah kerajaan yang merupakan sisa peninggalan kerajaan Karawang Jawa Barat. Sehingga tanah tersebut sekarang disebut dengan tanah peninggalan Syech Quro.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Sekretaris BKM Kab. Karawang Jawa Barat, di kantor Penamas Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Senin 19 Juli 2010.

Untuk menyelamatkan harta peninggalan Syech Quro, BKM Kab. Karawang Jawa Barat menelusuri keberadaan identitas tanah tersebut, dengan mencari data-data dan melakukan penelitian sampai negeri Belanda, untuk mencari data yang mana pemerintah Indonesia tidak mempunyai data yang kuat atas keterangan tanah tanah peninggalan Syech Quro tersebut. Setelah sudah jelas kemudian BKM Kab. Karawang Jawa Barat sebagai lembaga semi resmi berbadan hukum dari pusat sampai daerah (selaku *Nazir*) berusaha untuk mensertifikatkan tanah tersebut dan berhasil dengan baik sampai sekarang. Setelah sudah berjalan sesuai dengan rencana terhadap pengelolaan tanah wakaf tadi kemudian BKM Kab. Karawang Jawa Barat berusaha untuk mengembangkan harta wakaf tadi hingga bertambah sampai sekarang ini. Tambahan tadi berasal dari pembelian sawah baru dimana biaya pembelian diperoleh hasil lelang sewa tanah wakaf yang dilakukan tiap tahunnya. Para anggota lelang sewa tanah tadi merupakan masyarakat yang tinggal dimana terdapat tanah wakaf tadi, dengan syarat merupakan warga

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Sekretaris BKM Kab. Karawang Jawa Barat, di Kantor Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Senin 19 Juli 2010.

negara Indonesia yang diutamakan yang beragama Islam. Masa untuk penyewaan tanah wakaf tadi adalah satu tahun.⁷⁵

B. Macam- macam Harta wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat

Harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat peninggalan Syech Quro terdiri:

1. Sawah
2. Tanah atau pekarangan
3. Makam.

Adapun luas tanah wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat sekarang ini sudah hampir mencapai ± 550 ha. Adapun data yang diperoleh oleh penulis, luas tanah wakaf BKM Kab Karawang Jawa Barat peninggalan Syech Quro pada bulan Juli, tahun 2010 sebagai berikut:

1. Untuk luas kekayaan benda tidak bergerak berupa tanah wakaf $\pm 3.469.678 \text{ m}^2$.
2. Untuk luas kekayaan hasil pengembangan atau pembelian tanah wakaf $\pm 229.571 \text{ m}^2$.

Daftar Harta wakaf peninggalan Syech Ouro Karawang Jawa Barat yaitu:

1. Pekarangan di kel. Anjun luas 12.592 m², untuk masjid Agung Karawang Jawa Barat
2. Sawah di Telagasari Kab. Karawang Jawa Barat luas 7 bau

⁷⁵ Hasil Waawancara dengan Ketua BKM Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Senin 19 Juli 2010 di kantor Penamas Dep. Agama Kab. Karawang Jawa Barat.

3. Sawah di Wadas Kab. Karawang Jawa Barat luas 7 bau
4. Sawah di Pulau Bata Kab. Karawang Jawa Barat luas 32,5 bau
5. Sawah di Lamarin Kab. Karawang Jawa Barat luas 50 bau
6. Sawah di Klari Kab. Karawang Jawa Barat luas 100 bau
7. Sawah di Jatirasa Kab. Karawang Jawa Barat luas 33 bau
8. Sawah di Rengas Dengklok Kab . Karawang Jawa Barat luas 177 bau
9. Sawah di Peponcol Kab. Karawang Jawa Barat luas 70 bau

Harta peninggalan Syech Quro di atas merupakan tanah yang sudah berhasil disertifikatkan, walaupun ada yang mungkin masih ada yang belum tersertifikasi, sehingga diambil oleh Pemda Karawang Jawa Barat. Kemudian dengan tujuan untuk menyelamatkan keberadaan tanah wakaf tersebut agar tidak hilang fungsi, maupun bentuk aslinya, BKM kab. Karawang Jawa Barat mencoba untuk mendayagunakannya. Tujuannya agar dapat berkembang dan dapat bermanfaat sebagaimana mestinya, juga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, dan bukan untuk dimanfaatkan oleh badan atau yayasan tertentu untuk kepentingan pribadi.⁷⁶

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Sekretaris BKM Kab. Karawang Jawa Barat, di kantor Penamas Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Senin 19 Juli 2010.

- e. Pembiayaan memperingati haul Syech Quro setiap tahunnya.⁷⁸

Adapun persentase dana yang dikeluarkan tiap tahunnya yaitu:

- a. Dana 8,4% dari hasil lelang sawah tiap tahunnya, untuk kegiatan rutin berupa pelaksanaan lelang, pembiayaan inventaris, belanja inventaris, biaya kebutuhan BKM Kab. Karawang Jawa Barat, perjalanan dinas.
 - b. Dana 29,59% dari hasil lelang sewa sawah tiap tahunnya Pembangunan atau pemeliharaan dan operasional Masjid Agung Karawang Jawa Barat.
 - c. Dana 36,43% dari hasil lelang sewa sawah tiap tahunnya, untuk pembangunan lain-lain, seperti pembangunan gedung ruko dan penginapan, perbaikan irigasi sawah, pembelian sawah baru.
 - d. Dana 25,58% dari hasil sewa sawah wakaf tiap tahunnya, untuk bantuan ketempat-tempat dibidang pendidikan dan sosial keagamaan.⁷⁹
3. Rencana Perubahan Terhadap Harta Wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat

Tidak ada perubahan terhadap harta wakaf karena secara Syar'i tidak boleh, dalam hal ini apalagi sudah diberdayakan dan sudah berjalan lancar. Pernah terjadi penggantian tanah wakaf yang berupa sawah digunakan untuk jalan lingkaran kota Karawang Jawa Barat seluas ± 4 ha, kemudian mendapat ganti tanah seluas ± 8 ha. Hal ini disetujui oleh BKM karena untuk

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua BKM Kab. Karawang Jawa Barat, Bpk. Bambang Sugito TH, di Kantor Penamas Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Rabu 21 Juli 2010

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan sekretaris BKM Kab. Karawang Jawa Barat di Kantor Penamas Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Rabu 21 Juli 2010.

kepentingan umum atau negara dan mendapat ganti setidaknya sama atau bahkan lebih.⁸⁰

4. Tujuan dalam Pengelolaan Harta Wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat

Tujuan utama BKM Kab. Karawang Jawa Barat yaitu untuk menyelamatkan harta wakaf dan menggunakan hasilnya sesuai dengan rencana yang sudah dirapatkan oleh pengurus BKM. Dimana tiap tahun dirapatkan semua rencana, kemudian hasil keputusan rapat dilaksanakan. Rencana dan Tujuan BKM kedepan adalah:

- a. Mengembangkan aset BKM Kab. Karawang Jawa Barat dengan cara menjalin kerja sama dengan para investor untuk *profit oriented* yang dapat menguntungkan BKM.
 - b. Menata sistem pelelangan harta wakaf yang dapat menguntungkan BKM sekaligus masyarakat petani para penggarap.⁸¹
5. Tehnik Pengelolaan Harta Wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat

Cara pengelolaan yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan Pelelangan Sewa Sawah.

Pelelangan ditujukan kepada petani penggarap yang tinggal
dimana sawah tadi berada. Disini pengurus BKM akan membuat tata

⁸⁰ Menurut Drs. Mulyani yang merupakan Presidium LSM GOL Karawang Jawa Barat salah satu LSM yang sering mengkritisi terhadap pendayagunaan harta wakaf yang dikelola oleh BKM.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ketua BKM Kab. Karawang Jawa Barat, di kantor Penamas Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Hari Rabu 21 Juli 2010, data terlampir.

- Pelaksanaan lelang (Hari, Tanggal, Waktu, Tempat, Peserta, Agenda rapat)
- Keputusan dan ketetapan hasil lelang sewa sawah wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat
- Peserta lelang
- Sawah wakaf yang di sewa dengan cara lelang
- Pemenang lelang dan harga lelang
- Rekapitulasi pemenang dan harga lelang

a) Peserta Lelang

- 1) Peserta lelang sewa sawah wakaf adalah penduduk Desa dimana tanah tersebut berada dengan menunjukkan bukti diri (KTP) yang masih berlaku.

- (a) Telagasari Kab Karawang Jawa Barat Luas 7 bau.....Rp.
2.000.000,-
- (b) Wadas Kab Karawang Jawa Barat Luas 7 bau...Rp.
3.500.000,-
- (c) Karawang Jawa Barat Kulon Kab Karawang Jawa Barat Luas
32,5 bau...Rp. 6.000.000,-
- (d) Rengas Dengklok Kab Karawang Jawa Barat Luas 50 bauRp.
5.500.000,-
- (e) Lamaran Kab Karawang Jawa Barat Luas 100 bau..Rp.
6.000.000,-
- (f) Pulau Batak Kab Karawang Jawa Barat Luas 33 bau...Rp.
3.000.000,-
- (g) Anjun Kab Karawang Jawa Barat Luas 177 bau.Rp.
16.000.000,-
- (h) Jatirasa Kab Karawang Jawa Barat Luas 70 bau..Rp.
6.000.000,--Uang jaminan dapat diambil kembali oleh peserta
lelang yang kalah sejumlah yang diserahkan. Bagi peserta
lelang yang dinyatakan menang, uang jaminan tersebut
diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran harga lelang.

- e) Lain-lain

- Adapun Sawah wakaf yang di lelang untuk disewakan adalah:**

- 1) Desa Wadas Kab Karawang Jawa Barat luas 7 bau
- 2) Desa Telagasari Kab Karawang Jawa Barat luas 7 bau

- 3) Desa Lamaran Kab Karawang Jawa Barat luas 32,5 bau
- 4) Desa Rengas Dengklok Kab Karawang Jawa Barat luas 33 bau
- 5) Desa Anjun Kab Karawang Jawa Barat luas 100 bau
- 6) Desa Poponcol Kab Karawang Jawa Barat luas 177 bau
- 7) Desa Jatirasa Kab Karawang Jawa Barat luas 50 bau
- 8) Desa Karawang Jawa Barat Kulon Kab Karawang Jawa Barat luas 70 bau

Jumlah luas sawah yang di sewakan diatas adalah seluas 476,5
 bau. Dimana kondisi tanahnya berbeda di masing-masing desa.

b. Menyewakan Gedung dan Pekarangan

Dalam hal persewaan gedung atau bangunan yang didirikan oleh BKM Kab. Karawang Jawa Barat, merupakan bentuk usaha lain dari usaha sewa sawah selama ini, dan usaha persewaan gedung disini, yaitu segala hal-hal yang terkait dengan sewa menyewa disepakati oleh kedua belah pihak, dengan jangka waktu sesuai keinginan si penyewa dan persetujuan BKM Kab. Karawang Jawa Barat. Contoh gedung dan pekarangan yang disewakan yaitu untuk pusat perbelanjaan, diantaranya ada swalayan dan pertokoan, dan BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) yang ada di pusat kota Karawang Jawa Barat, wisma BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat.

Disamping menyewakan gedung, Pekarangan dari harta wakaf tersebut juga dipergunakan untuk mendirikan masjid, Rumah Sakit, gedung sekolah, makam dan perkantoran. Akan tetapi dari penggunaan pekarangan dari harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat ini kesemuanya tidak dipungut biaya, karena itu untuk kepentingan umum.

6. Pelaksanaan Lelang Sewa Sawah

Pelaksanaan lelang sewa sawah wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat masa tanam 2008/2009

- a. Hari : Senin
- b. Tanggal : 18 Juli 2008
- c. Waktu : Jam 09.00 WIB
- d. Tempat : Aula Kandepag Kabupaten Karawang Jawa Barat
- e. Peserta :
- 1. Tim Lelang : 23 Orang
 - 2. Undangan : 20 Orang
 - 3. Masyarakat Umum: 215 Orang
- f. Agenda rapat:
- 1. Pembukaan (Al-Fatihah)
 - 2. Tahlil dipimpin oleh KH. Masruchin Ahmad
 - 3. Sambutan Ka Kandepag Kabupaten Karawang Jawa Barat sekaligus membuka lelang secara resmi dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama
 - 4. Pelaksanaan lelang

- 7) Pengambilan kertas ini bisa saja dilakukan beberapa kali, jika belum ada harga lelang yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 8) Setelah sudah sesuai dengan harga minimal yang ditetapkan oleh BKM Kab. Karawang Jawa Barat, maka akan diumumkan siapa yang berhak menyewa sawah wakaf tadi. Dimana pemenangnya adalah penyewa yang berani menawar dengan harga yang paling tinggi diantara temannya yang lain.
- 9) Pemenang sewa sawah wakaf tadi dipersilakan kedepan untuk diambil fotonya dengan salah satu anggota Tim Lelang.
- 10) Pemenang lelang dipersilahkan untuk membayar tunai harga lelang yang telah dimenangkan dengan dikurangi uang jaminan yang sudah diberikan disaat pendaftaran tadi.
- 11) Langkah-langkah diatas akan dilakukan beberapa putaran, dan bergantian untuk delapan desa. Dimana dengan luas sawah, harga, dan luas tanah yang berbeda-beda.
- 12) Diakhir acara dilakukan pengumuman hasil pemenang lelang dari masing-masing desa, dan juga harga sewa sawah yang berhasil dilelang.
- 13) Setelah melakukan pembayaran tunai pemenang lelang menandatangani surat kontrak yang telah disediakan.

berarti, semua berjalan dengan lancar karena segala sesuatu di rapatkan oleh pengurus BKM terlebih dahulu, sehingga hasil kebijaksanaan hasil rapatpun dilaksanakan sesuai dengan rencana.⁸⁵

9. Laporan Hasil Pengelolaan sewa Harta Wakaf BKM Kabupaten Karawang
Jawa Barat

Dalam setiap hal yang terjadi dengan tanah wakaf selalu dilaporkan termasuk hasil pemberdayaannya. Dan laporan tadi disampaikan ke pusat dalam hal ini kepada Menteri Agama RI, Kanwil Depag Prop Jabar, Ketua BKM Prop Jabar.⁸⁶

⁸⁵ Menurut Drs. Mulyani, dalam pengelolaan harta wakaf oleh BKM terjadi banyak komufase

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua BKM Kab. Karawang Jawa Barat, Bpk. Bambang Sugito TH., di kantor Penamas Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Rabu 21 Juli 2005.

yang dilakukan oleh BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat agar mampu mendatangkan hasil. Dalam hal ini, penulis meneliti BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat dalam mengusahakan bagaimana Pengelolaan harta wakaf, sehingga dapat dimanfaatkan untuk tujuan wakaf.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah⁹¹

Wakaf sebagai salah satu bentuk shodaqoh jariyah mempunyai fungsi dan peran yang sangat besar dalam kehidupan sosial umat Islam. Besarnya fungsi ini dapat dirasakan oleh umat Islam jika Pengelolaan terhadap harta wakaf tersebut dapat terealisasi dengan baik. Karena melalui wakaf ini banyak berdiri tempat-tempat ibadah, lembaga pendidikan, yayasan sosial, pondok pesantren.

Berdasarkan catatan sejarah bahwa masjid-masjid wakaf Karawang Jawa Barat, Jawa Barat, memiliki banda tanah wakaf berupa tanah pertanian dan tanah-tanah disekitarnya. Tanah-tanah tersebut merupakan wakaf dari Pengageng Pemerintah waktu itu (Syech Quro). Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 92 Tahun 1962 Secara historis riwayat kepemilikan tanah wakaf berdasarkan Stanblat No 605, jo Besluit Governour General Van Ned Indie, ddo 12 Agustus 1896 nomor 43, jo ddo 6 November 1912. No 22 C Bijblad 7760.

⁹¹Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang RI No. 41 Tahun 2003 Tentang Wakaf*, Jakarta : Harvindo, 2005, 2

Kemudian Keputusan Menteri Agama (KH Saefuddin Zuhri) Nomor 92 Tahun 1962 tersebut menetapkan Status Hukum Masjid Karawang Jawa Barat, sebagai masjid wakaf, dan tidak hanya sebagai obyek (bangunan saja) melainkan sebagai subyek hukum (badan usaha) yang berhak memiliki harta kekayaan, sesuai dengan sejarah masjid tersebut. Dalam KMA tersebut juga menetapkan bahwa masjid-masjid tersebut adalah badan keagamaan. Dalam KMA tersebut ditunjuk PKM (Pengurus Kas Masjid) setempat sebagai *nazir* wakaf atas harga masjid-masjid tersebut.⁹² BKM (yang sekarang bertindak sebagai *Nazir* wakaf) adalah merupakan organisasi dilingkungan Departemen Agama, yang baru dibentuk pada tahun 1978, tanggal 11 November 1978. BKM (Pusat) sebagai suatu badan hukum yang dapat mempunyai tanah sebagai hak milik baru pada tahun 1982, berdasarkan surat menteri Dalam Negeri Nomor SK 178/DJA/1982 tanggal 21-9-1982.⁹³

⁹² Lampiran, “Keputusan Menteri Agama”, dalam Fathuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid Yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, 258

⁹³ Komisi Fatwa MUI, "Sikap Resmi MUI Jawa Barat Terhadap Kasus Banda Masjid Semarang", dalam H Agus fathuddin Yusuf, op. cit., 284

Bambang Sugito TH, dan sekretaris BKM Bpk. Ali Sugiyanto, SHI., selain itu juga mendapatkan beberapa data tentang kondisi dan situasi BKM Kab. Karawang Jawa Barat saat ini, dan penulis juga melakukan observasi terhadap pelaksanaan lelang sewa sawah wakaf, dimana hal itu merupakan salah satu cara agar harta wakaf itu dapat memperoleh hasil untuk dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan harta wakaf yang ada dan merupakan cara pengembangan harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat. Selain melakukan wawancara dengan pengurus BKM Kab. Karawang Jawa Barat, dan sebagai pelengkap, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Ketua Presidium LSM GOL Karawang Jawa Barat, dan masyarakat yang berhubungan langsung dengan tanah wakaf tersebut.

Sehubungan dengan hal ini, karena tanah wakaf tadi merupakan tanah peninggalan Syech Quro yang terbengkelai, maka dengan berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf b UUPA tersebut menentukan bahwa pemerintah Indonesia dalam rangka sosialisme indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam peruntukan seperti dimaksud di atas, termasuk untuk keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁴ Secara lebih khusus, keperluan yang termasuk kepentingan agama/peribadatan ini disebut dalam pasal 49 ayat (3)

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta:Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf,Cet.ke-4,1984/1985, 7-8

⁹⁵ *Ibid.*, 18

1. Menjaga martabat, kesucian, kehormatan, dan kesejahteraan masjid serta tempat ibadah umat Islam atas dasar takwa;
2. Meningkatkan pengelolaan manajemen masjid, memakmurkan masjid, memelihara kebersihan dan keindahan masjid, dan tempat ibadah umat islam lainnya, sesuai dengan fungsinya sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan agama Islam non formal dan pemberdayaan ekonomi umat serta media kesehatan umat.

Dengan tujuan BKM tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, BKM adalah salah satu badan hukum yang mengelola tentang manajemen masjid, juga bertujuan dalam pemberdayaan ekonomi umat, dan BKM merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi tidak melalaikan kepentingan-kepentingan lain umat Islam.

Walaupun BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat berada dibawah binaan Departemen Agama, bukan berarti Departemen Agama bisa bertindak sendirinya terhadap kebijaksanaan yang akan diambil dalam permasalahan wakaf yang dikelola oleh BKM, Departemen Agama hanya mengawasi saja. Dan sekarang ini segala sesuatu yang berhubungan dengan

⁹⁶ H Agus Fathuddin Yusuf, *loc.cit*

Pengelolaan harta wakaf, baik dalam pengelolaan dan pengembangannya sekarang ini mendapat pengawasan dan pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia, sesuai yang tertuang dalam undang-undang wakaf Indonesia.

Menurut informasi yang penulis dapatkan kebijakan yang berada di tangan BKM Kab. Karawang Jawa Barat mendapat campur tangan dari Pemda Karawang Jawa Barat, sehingga dari sini dapat dimungkinkan segala hal yang berhubungan dengan harta wakaf yang dikelola oleh BKM tidak lepas dari campur tangan pemda Karawang Jawa Barat. Bahkan jika terdapat penyelewengan terhadap Pengelolaan harta wakaf, yaitu tentang tukar-menukar tanah wakaf yang produktif ditukar dengan tanah yang kurang produktif. Dan salahnya lagi jika tukar-menukar itu tidak untuk kepentingan umum, akan tetapi untuk kepentingan pribadi.

Seperti yang diutarakan oleh Ketua Presidium LSM GOL Karawang Jawa Barat, terdapat penyelewengan tukar menukar tanah di belakang pom bensin Jl Syeck Quro Karawang Jawa Barat, atas permintaan Bupati Kab. Karawang Jawa Barat, yang mana tanah tersebut akan ditukar dengan tanah di Telagasari, akan tetapi atas kritikan masyarakat, tanah yang telah berhasil dipondasi dan berhasil diuruk dengan tanah ini, sekarang ini terbelongkai. Dan juga terjadi pertukaran tanah di Wadas yang digunakan Halim untuk usaha pemecahan batu yang telah ditukar dengan tanah di Karawang kulon Jawa Barat. Jika dilihat dari hukum

Islam, penukaran tanah tersebut tidak sah karena tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan seandainya tanah tersebut dikelola sendiri oleh BKM Kab. Karawang Jawa Barat sebagai *Nazimya*, tentunya akan dapat difungsikan secara maksimal. Jika dilihat dari nilai profit hasil dari usaha yang didirikan di tanah wakaf tadi, dapat dipastikan akan menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk tujuan BKM. Dan jika tanah wakaf tadi difungsikan untuk tempat usaha yang produktif, maka akan dapat menciptakan lowongan kerja untuk kaum muslim. Dengan bertambahnya lowongan kerja, maka dapat mengurangi jumlah pengangguran, dan dapat meningkatkan perekonomian umat. Jika tanah yang produktif tadi hasilnya digunakan untuk memberikan pelatihan kerja atau pelatihan-pelatihan ketrampilan secara rutin dan terjadwal untuk menambah profesinalisme kerja kepada siswa-siswa di sekolahan, pondok pesantren, panti asuhan, ataupun penyuluhan pelatihan di masjid di desa-desa di setiap cabang-cabang BKM di Karawang Jawa Barat, maka akan memungkinkan terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas dan siap kerja. Jika hal tersebut dapat dikembangkan bukan hanya di satu tempat saja, maka akan dapat dimungkinkan keuntungan yang akan di ambil BKM akan bertambah, dan pemberdayaan ekonomi umatpun dapat dicapai. Bayangkan jika seluruh BKM yang ada di Indonesia yang memiliki tanah wakaf seperti halnya BKM Kab. Karawang Jawa Barat, dengan melakukan pemaksimalan Pengelolaan harta

- Wakaf peninggalan Syech Quro yang dikelola BKM Kabupaten. Karawang Jawa Barat dalam peruntukannya termasuk *waqf khairiy*, yaitu harta wakaf tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat umum. Adapun wakaf tersebut tidak dibatasi waktu, untuk selama-lamanya. dan dalam penggunaannya bisa digunakan secara langsung atau sebagai wakaf produktif.

Oleh karena BKM Kab. Karawang Jawa Barat yang menjadi *Nazir*, maka BKM tersebut harus melaksanakan tugas-tugasnya sebagai *Nazir*, berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Adapun ketentuan tugas-tugas *Nazir* tercantum dalam Undang-Undang Wakaf, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 41 Tahun 2004, disamping PP No. 28/1977, dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari perundang-undangan dan peraturan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang kedudukan *Nazir* adalah supaya *Nazir* dalam pemanfaatan harta wakaf tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengelola dan mengembangkan potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Pemanfaatan untuk kemaslahatan tidak harus untuk hal yang konsumtif, tanpa ada perhitungan dan pertimbangan, tapi bisa dengan hal yang produktif dalam Pengelolaannya. Demikian pula, bukan hanya untuk bangunan fisik masjid, yang sering menjadi “*trade mark*” para pengurus ta’mir masjid, meskipun dalam batas tertentu tidak dapat dihindari bangunan fisik itu.⁹⁸ Wakaf merupakan harta yang mahjur, yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan menurut syara’ memiliki sendiri dan mengalihkan kepada orang lain, adakalanya benda itu wakaf, ataupun

⁹⁸ A. Qodri Azizi, *op. cit.*, 124

benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan-kuburan, dan harta-harta yang wakaf.⁹⁹

Harta-harta yang diwakafkan, mahjur asalnya, tidak bisa dimiliki, tidak bisa dibagi kepada orang-orang yang berhak menerima hasilnya. Dalam pada itu hasilnya adalah milik bagi mereka semua.¹⁰⁰

Nazir atau pengelola wakaf hanya bisa menikmati hasil wakaf tidak lebih dari 10 % dari hasil bersih wakaf (UU RI No. 41 Tentang Wakaf). Harta (*mal*) adalah nama bagi yang selain manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dilakukan *tasarruf* dengan jalan ikhtiyar.¹⁰¹

Untuk mencapai tujuan agar harta wakaf tersebut dapat berfungsi sebagai mana mestinya BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat melakukan Pengelolaan terhadap harta wakaf yang dikelolanya.

Harta Wakaf oleh BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat yaitu berupa tanah pekarangan, sawah, dan makam yang merupakan peninggalan Syech Quro. Tanah yang merupakan permukaan bumi (pasal 1 ayat (3) pasal 4 ayat(1) UUPA) merupakan tempat manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia.¹⁰² Hukum telah mengatur tentang hak-hak dan kewajiban dalam melaksanakan kehidupannya secara bermasyarakat.

⁹⁹ Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001, 180

¹⁰⁰ Ibid, 185

¹⁰¹ Ibid, 154

¹⁰² G. Kartasapoetra, et al., *Hukum Tanah jaminan UUPA bagi keberhasilan Pengelolaan tanah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, v

Dari data yang didapatkan terdapat bermacam program terhadap pengalokasian dari hasil Pengelolaan harta wakaf, diantaranya yaitu program rutin tahunan, yakni memperingati haul dari Syech Quro Karawang Jawa Barat, tak tanggung-tanggung dana yang dibutuhkan adalah berkisar 150 juta, merupakan dana yang sangat besar untuk sebuah acara, semoga acara yang seperti ini tidak membuka keinginan para perorangan atau pejabat untuk memanfaatkan acara tersebut untuk lahan yang empuk untuk menambah kantong pribadi.

Dari data yang penulis dapat persentasi dana pengalokasian hasil pendayagunaan harta wakaf tidak dicantumkan dana yang digunakan untuk kesejahteraan para pengurus BKM Kab. Karawang Jawa Barat, memang jika dilihat terjadi kegagalan didalamnya, tidak mungkin *Nazir* (BKM Kab. Karawang Jawa Barat) tidak mendapatkan upah atas segala usaha yang dilakukannya dalam mengelola harta wakaf tersebut. Padahal secara hukum

Biaya Pengeluaran:

1. Dana 8,4 % dari hasil lelang sawasawah tiap tahunnya digunakan untuk kegiatan rutin berupa pelaksanaan lelang, pembiayaan inventaris, belanja inventaris, biaya kebutuhan BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat, perjalanan dinas.
a) $8,4\% \times \text{Rp. } 1.016.015.200,- = \text{Rp. } 85.345.276,8,-$
 2. Dana 29,59 % dari hasil lelang sewa sawah tiap tahunnya digunakan untuk pembangunan atau pemeliharaan dan Operasional Masjid Agung Karawang Jawa Barat.
b) $29,59\% \times \text{Rp. } 1.016.015.200,- = \text{Rp. } 300.638.897,7,-$
 3. Dana 36,43 % dari hasil lelang sewa sawah wakaf tiap tahunnya, untuk pembangunan seperti gedung rukho, penginapan, perbaikan irigasi sawah, pembelian sawah baru.
c) $36,59\% \times \text{Rp. } 1.016.015.200,- = \text{Rp. } 370.134.337,4,-$
 4. Dana 25,58 % dari hasil lelang sewa sawah tiap tahunnya digunakan untuk bantuan ketempat-tempat ibadah, pendidikan, dan sosial keagamaan.
d) $25,58\% \times \text{Rp. } 1.016.015.200,- = \text{Rp. } 259.896.688,2,-$
- Jumlah Biaya Pengeluaran:
- a) $\text{Rp. } 85.345.276,8,-$
 - b) $\text{Rp. } 300.638.897,7,-$
 - c) $\text{Rp. } 370.134.337,4,-$

d) Rp. 259.896. 688,2 ,-

$$\dots +$$

Rp. 1.016.015.200,-

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pengalokasian Hasil Pengelolaan

harta Wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat, yaitu :

Hasil Lelang Sewa Sawah WakafRp. 1.016.015.200,-

Rencana Biaya pengeluaran.....Rp. 1.016.015.200 ,- (-)

Saldo.....Rp. 0,-

Rekapitulasi estimasi dana diatas penulis dapatkan berdasarkan rosentase dana pengalokasian hasil Pengelolaan dengan hasil pendapatan lelang sewa sawah yang didapat pada tanggal 18 Juli 2008.

Setelah selesai acara lelang sewa sawah wakaf para pemenang lelang membayar uang sewa sawah tadi kepada BMT, atas nama BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat. BMT merupakan salah satu penyewa gedung BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat.

Hasil dari sewa lelang sawah wakaf yang telah didapat diperuntukkan untuk kepentingan wakaf, dalam hal ini digunakan untuk kepentingan BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat selaku pengelola (*Nazir*) wakafnya.

Dalam Islam tidak ada sesuatu yang membatasi akad dan macam-macamnya. Maka segala akad yang tidak dilarang syara' dengan nash yang sharih dan tidak berlawanan dengan kaidah-kaidah syar'iyah dan dasar-dasarnya, dapat dilakukan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Ibid., 74

¹⁰⁹ Salim HS., Hukum Kontrak teori dan tehnik penyusunan kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 28

tanah itu, kemudian membayar jumlah yang kecil yang diambil dari mustakhir. Maka orang yang membayar itu berhak membangun rumah ditanah itu, berhak menanam pepohonan di atas tanah itu, berhak mengambil manfaat. Dan haknya ini dapat dijual belikan dan dipindahkan kepada para warisnya. Pengurus wakaf menyewakan tanah wakaf itu adalah karena tanah itu tidak menghasilkan apa-apa, lantaran sudah beratus tahun terbengkelai.

2. *Haqqul Ijaratain*, yaitu : hak yang diperoleh lantaran akad ijarah dalam tempo yang lama, dengan seizin hakim, atas tanah wakaf yang tak sanggup dikembalikan dalam keadaan semula, karena kebakaran umpamanya, dengan harga yang hampir menyamai harta tanah, sedang sewanya dibayar saban tahun.”

Akad itu keluar dari hukum tidak boleh menjual harta wakaf satu jalan keluar dari hukum tidak boleh menjual harta wakaf dan tidak boleh menyewakan dalam waktu yang lama.”.¹¹⁰ Dari kutipan diatas telah memberikan gambaran pada penulis, bahwa untuk mencegah agar tanah wakaf tidak terbengkelai maka diusahakan dengan cara menyewakannya, agar manfaat yang ada pada harta wakaf tersebut dapat diperuntukkan untuk tujuan wakaf.

Dalam Pengelolaan Harta Wakaf oleh BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat, untuk yang sewa sawah dengan sistem lelang, waktu

¹¹⁰ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, op.cit., 132

penyewannya tanah tersebut hanya dalam satu tahun saja, hal tersebut dimaksudkan agar petani penggarap bisa saling bergantian untuk menyewanya. Sedangkan untuk yang sewa tanah dan bangunnanya, kontrak sewa di buat oleh kedua belah pihak.

Peserta lelang sewa sawah wakaf tersebut berasal dari warga masyarakat desa dimana harta wakaf itu ada. Tim lelang sewa sawah harusnya juga memperingatkan kepada petani penggarap sawah wakaf, bahwa sawah yang tersebut adalah sawah wakaf peninggalan Syech Quro Karawang Jawa Barat. Dimana dalam penggunaanya haruslah untuk tujuan ibadah kepada Allah SWT. Oleh karenanya, maka penyewa harus menjaga dengan baik amanah yang diberikan terhadap mereka

Dalam hal persewaan diatas maka berlakulah hukum kontrak, yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹¹ Dimana persetujuan dan perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Maka dalam pengertian hukum kontrak diatas adalah ada tiga unsur yaitu :

1) Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis ialah kaidah-

¹¹¹ Salim HS., *op.cit.*, 4

kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.¹¹²

Dalam hal ini setiap pelaksanaan sewa sawah dan sewa gedung dan bangunan dilakukan dengan cara kontrak tertulis, walaupun hanya satu tahun untuk sewa sawah wakaf. dan untuk jangka waktu tertentu untuk gedung dan bangunannya, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2) Subyek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur.¹¹³ Syarat utama bagi yang melakukan ijarah ialah berakal sehat dan mampu membedakan mana yang baik dan mana pula yang tidak baik.¹¹⁴

Dalam hal ini kreditur yang dimaksud adalah pihak BKM Kab. Karawang Jawa Barat yang mengelola tanah wakaf, dan debiturnya adalah Penyewa harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat.

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid

¹¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993, 35

3) Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:

- a) Memberikan sesuatu,
- b) Berbuat sesuatu, dan
- c) Tidak berbuat sesuatu.¹¹⁵

Dalam hal ini BKM Kab. Karawang Jawa Barat berhak atas harta wakaf tadi untuk disewakan atau tidak, atau atas jangka waktu sewa tertentu, dan kewajiban dari penyewa adalah dengan menyetujui apa yang disyaratkan oleh BKM Kab. Karawang Jawa Barat, sebagai penyewa harta wakaf tersebut.

4) Kata sepakat

Di dalam pasal 1320 KUH Perdata ditentukan empat syarat sahnyanya perjanjian. Salah satunya kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Para pihak harus menyelenggarakan akad harus berbuat atas kemauan sendiridengan penuh kerelaan.¹¹⁶

5) Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak

¹¹⁵ Salim HS, *loc.cit.*.

¹¹⁶ Helmi Karim, *loc.cit.*

adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.¹¹⁷ Dalam hal ini BKM Kab. Karawang Jawa Barat setelah terjadi kontrak sewa harta wakaf, maka wajib menyerahkan harta wakaf tersebut untuk disewa sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dan pemenang lelang atau penyewa gedung dan bangunan tadi berhak untuk melakukan usaha dan tidak melakukan usaha terhadap harta wakaf yang telah disewa.

Setelah selesai pelaksanaan lelang sewa sawah dan persewaan gedung, BKM Kab. Karawang Jawa Barat menulisnya dalam surat kontrak yang dibuat dihadapan notaris. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Baqarah 282, dimana jika terjadi hutang-piutang yang dibatasi waktu, hendaklah menulisnya.

Dengan adanya sistem kontrak dalam Pengelolaan harta wakaf tadi maka akan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

Proses lelang sewa sawah wakaf yang diadakan oleh BKM Kab. Karawang Jawa Barat pada tanggal 18 Juli 2008, menurut penelitian penulis sudah berjalan lancar, karena jika dilihat dari syarat peserta lelang, keanggotaan tim lelang, dan pelaksanaan lelangnya pun sudah sesuai prosedur hukum dan bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.

¹¹⁷ Salim HS, *loc.cit.*.

Tetapi ada sedikit ganjalan, karena dalam acara lelang sempat terhambat dengan kegaduhan dikarenakan adanya peraturan tahun lalu yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat tahun ini, jadi banyak peserta lelang yang menyesalkan hal tersebut. Dan dari peserta lelang yang hadir banyak sekali membawa pendukung dari kelompoknya masing-masing, kondisi ditempat lelang yang semakin memanas dengan tawar-menawar harga yang bersaing, membuat pendukung masing-masing kelompok menjadi ramai, gaduh, seperti mau perang antar desa. Akan tetapi perang disini lain, yaitu perang dalam memperebutkan untuk dapat menyewakan tanah wakaf yang harganya sangat murah dan memiliki profit jika tanah tersebut digarap atau didayagunakan.

Dari penelitian penulis, pemenang lelang sewa sawah pada saat itu adalah sebagian besar adalah pemenang lelang sewa tahun kemarin, sawah yang berhasil disewa oleh pemenang lelang tadi yang kebanyakan dijual kepada masyarakat desa setempat, akan tetapi dapat dimungkinkan monopoli harga, yang tentunya tidak terlepas dari pemenang lelang sewa sawah wakaf tadi. Karena jika dilihat dari harga lelang, harga sewa harga sawah wakaf relatif murah dibanding dengan harga umum. Kemudian pemenang lelang tadi menyewakan kembali kepada masyarakat umum dengan harga yang lebih tinggi sesuai keinginan pemenang lelang, walaupun masyarakat tidak bersedia menyewa kepada pemenang lelang

tadi, maka pemenang lelang tadi berhak untuk menggarapnya sendiri. Jika demikian tanah wakaf tadi tidak bisa dirasakan oleh masyarakat umum. Jika memang tanah wakaf itu peruntukannya untuk masyarakat umum, tentunya perlulah BKM tetap mengawasi terhadap nasib tanah wakaf yang telah disewakan, hal tersebut dimaksudkan agar pemenang lelang tadi tidak memonopoli tanah wakaf tadi. Sehingga disini lebih diutamakan moral kemanusiaan dari pada unsur profitnya.

Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits serta tertulis dalam buku-buku klasik (*turats*) yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat, dan persaudaraan sesama manusia.¹¹⁸

Hasil dari persewaan tanah tadi masuk dalam kas BKM Kab. Karawang Jawa Barat, dari hasil Pengelolaan tadi hasilnya digunakan:

- a) Keperluan peribadatan, seperti mesjid, musholla/langgar;
- b) Keperluan sosial, seperti sekolah, rumah sakit, makam, gedung; dan
- c) Penunjang kegiatan, seperti sawah, persewaan gedung untuk usaha.

Selain untuk bantuan pendidikan Islam, kegiatan sosial keagamaan, juga hal yang lebih diutamakan adalah biaya untuk operasional, pembangunan, perawatan Masjid agung Karawang Jawa

¹¹⁸ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, 58

Barat, dan untuk memperingati haul Syech Quro tiap tahunnya, dan usaha pengembangan harta wakaf, diantaranya pembelian sawah baru.

Status tanah wakaf peninggalan Syech Quro adalah berstatus hak milik, dimana dalam hal ini BKM yang telah mensertifikatkan tanah banda masjid tersebut, atas perintah Menteri Agama berhak memiliki hak milik atas tanah wakaf tersebut. Dan sertifikat tanah wakaf tersebut atas nama BKM.

Dan badan-badan wakaf yang dibangun untuk memelihara suatu kepentingan umum, dapat kita pandang sebagai seorang pribadi (badan hukum) dalam arti dapat memiliki, dapat mempunyai dan dipandang sebagai kepunyaan manusia bersama.¹¹⁹

¹¹⁹ Teungku M. Hasbi Ashshiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, op. cit., 194

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan skripsi ini menjadi beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pengelolaan harta wakaf Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Karawang Jawa Barat dengan cara sewa sawah wakaf dengan menggunakan sistem lelang, sewa gedung dan bangunannya untuk bisnis. Dari hasil pengelolaan harta wakaf tadi digunakan untuk melaksanakan program BKM tiap tahunnya yaitu memberi bantuan untuk tempat-tempat ibadah, pendidikan Islam, kegiatan sosial keagamaan, serta untuk pemeliharaan masjid dan operasional kegiatan Masjid Agung Karawang Jawa Barat, kemudian untuk haul Syech Quro tiap tahunnya. Kemudian dari hasil pengelolaan harta wakaf tadi diperuntukkan untuk pengembangan harta wakaf dengan cara pembelian sawah baru.
2. Dalam tinjauan Hukum Islam dengan adanya hak *qarar* atas tanah wakaf, yaitu *haqqul Hakr* dan *Haqqul Ijaratain*, pengelolaan dengan menggunakan sistem sewa sawah wakaf ataupun menyewa gedung dan bangunan, kemudian hasil dari sewanya diperuntukkan untuk tujuan wakaf diperbolehkan, sehingga tanah tersebut tidak terbengkelai dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya.

Sedangkan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang dengan salah satu tujuannya adalah memelihara, masjid baik secara fisik dan non-fisik, serta membina dalam kepengurusan dan pemberdayaan masjid.

B. Saran-Saran

Demi terwujudnya kemaslahatan umum, penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah dengan adanya undang-undang wakaf, semestinya lebih meningkatkan pengawasannya terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
2. Badan Wakaf Indonesia harus memberi stimulus atau rangsangan terhadap pengelolaan harta wakaf, sehingga optimalisasi pengelolaan harta wakaf bisa tercapai.
3. BKM Kab. Karawang Jawa Barat yang merupakan *nazir* dari harta wakaf Syech Quro harusnya dapat mengembangkan pengelolaan harta wakaf agar produktif, dan harus dapat meningkatkan hasil pengelolaannya agar dapat dirasakan oleh masyarakat muslim secara langsung.
4. Hasil pengelolaan harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat harus dialokasikan dan disesuaikan kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar, Taqiyuddin, *Kifayah al- Akhyar*, juz 1, Semarang : Toha Putra, tt.
- Al-Ansari, Abi Yahya Zakariya, *Fath al Wahhab*, juz 1, Beirut: Dar al- Fikr, tt.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, Cet.I, 1988
- Al-Qusyairi, Imam Muslim bin Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz 2, Semarang: Usaha Keluarga: tth
- Al-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, Jilid 3, Beirut: Daar Al-Kutb, 1993.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. X, 1996
- Ash-Shan'aniy, Muhammad Ibn Ismail, *Subulu-s Salam*, Juz 3, Beirut: Daar al-Kutub, 1988
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Basyir, Ahmad Ashar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: al-Ma'arif, tt
- Dahlan, Abdul Azis, et., al., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet.ke-1, 1993
- _____, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet.ke-1, 1993
- Departemen Agama, *"Ensiklopedi Islam"*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.

_____, *Ilmu Fiqh*, Jilid III, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan tinggi Agama/IAIN, 1984/ 1985.

_____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1978/1979

_____, *Himpunan peraturan Perundang-undangan Perwakafan tanah milik*, Jakarta: Bag. Proyek Peningkatan Zakat dan wakaf, 2002

_____, *Himpunan Peraturan Perundang- undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Cet.ke-4 , 1984/1985

Doi, Rahman I., *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (syariah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.1,2002

Dumper, Michel, *Wakaf kaum Muslim di Negara Yahudi* , Jakarta: Lentera, Cet.I, 1999

Fadlullah, Muhammad dan B. TH. Brondgeest, *Kamus Arab-Melayu*, Jakarta: Balai Pustaka, Jilid 1, 1925

_____, *Kamus Arab-Melayu*, Jakarta: Balai Pustaka, Jilid 4,1927

Gazalba, Sigi, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pusataka Al-Husna, 1994

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1990

Kartasapuetra, G., et.al., *Hukum Tanah jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991

Lampiran, "Keputusan Menteri Agama", dalam Fathuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid Yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000

- Lubis, K. Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, 1990
- Ashshiddieqy, Tengku M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2002
- Mulder, Neils, *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet.VI, 1993
- Nadzir, Muh, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Cet. Ke-V, 2005
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, _____, *Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi ketiga)*, Jakarta: Balai pustaka, 2003
- Hasan, M. Ali, *Berbagai transaksi dalam Islam, (Fiqh muamalah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.1, 2003
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 1990
- Qamariyanti, Yulia, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997
- Qonat, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: khalifa, , Cet.1 2005,
- Raya, Ahmad Thib, Mulia, Musdah, Siti, Hj. *Menyelami Seluk-beluk Ibadah Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2003

Rofiq, Ahmad, H., *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, Cet.1, 2004

_____, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 1998,

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al- Sunnah*, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar

Grafika, 2005

Suhendi, Hendi H., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1973,

Tengku M. Hasbi Ashshiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki

Putra, 2001, hlm. 328

Tunggal, Hadi Setia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*

Tentang Wakaf, Jakarta: Harvarindo, 2005